PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Survei Pada BPKD Kabupaten Bandung Barat)

SULTON – 21112131

Pembimbing

Nisa Bequimaniar Rustriati, SE., MM

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

Email : sultonedo@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on BPKD West Bandung regency. The phenomenon that occurs on SAKD on the quality of financial statements of local government is the problem of record-keeping of assets annually not finished on the transfer of assets from Bandung regency and also there are assets that are not abandoned when the division as well as the phenomenon of financial management of the quality of financial statements of local government that is not good manage local finance that affect the quality of financial reports of local government which won the West Bandung regency WDP. The purpose of this study to determine the effect SAKD and Fiscal Management of the quality of financial statements of the local government district of West Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method to describe the variable SAKD, financial management and the quality of local government financial reports. The sampling technique using saturation sampling because the population and the same sample consisted of 36 respondents. Statistical test used is to design the structural model, designing a measurement model, construct the path diagram, and test the suitability of the model. Suitability test structural models and hypotheses using SmartPLS v.3.2.6.

The results showed that financial accounting systems area significantly influence the quality of local government financial statements and financial management significantly influence the quality of local government financial reports.

Keywords: SAKD, Financial Management and Quality of Local Government Financial Statements

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan pemerintah (Zuliarti, 2012).

Sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Agus Mulyanto, 2009).

Pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri (Elvira Zeyn, 2011).

Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik (Abdul Halim, Muhammad Iqbal 2012:20).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta memberikan informasi mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga instansi dapat lebih baik lagi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk konfirmasi antara teori dan praktik mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bandung Barat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bandung Barat.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina, Rambe Omar Sakti, Rasdianto (2015:5) menjelaskan pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

> “Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Adapun yang menjadi penilaian menurut Erlina, Rambe Omar Sakti, Rasdianto (2015:6) indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

1. Pencatatan
2. Penggolongan
3. Pelaporan

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dadang Suwanda, Hendri Santosa (2014:17) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

> “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Abdul Halim, Muhammad Iqbal (2012:25) siklus Pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban
5. Pengawasan

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) merupakan :

> “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian,serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Menurut Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin (2015:19) pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan :

"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan".

Menurut Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin (2015:15) karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah :

1. Relevan
   Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu:

a. laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya *(feedback value)*.
b. laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang *(predictive value)*.
c. laporan keuangan disajikan tepat waktu *(timeliness)* sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
d. penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin *(completness)* yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi perbuatan keputusan pengguna laporan.

2. Andal
   Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.

a. jujur, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya harus tetap mempunyai kesimpulan yang sama.
c. netral, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
4. Dapat dipahami
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2010:4) Pengelolaan keuangan daerah bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan *output* dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pemahaman dimaksud pada tataran konsep dan teknis akuntansi, dan juga sampai kepada pemahaman sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas seperti peraturan perundangan yang menaungi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Pengelolaan Keungan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2015:2) menyatakan bahwa metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Moh. Nazir (2014:43) pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara akurat mengenai fakta-fakta.

Menurut Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa metode verifikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31), operasional variabel didefinisikan sebagai berikut operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator, sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi variabel dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah". Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X1), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Variabel Independen (X2), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Variabel Dependen (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan *(Field Research)* dan studi kepustakaan *(Library Reseach)*. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*.
   a) Wawancara *(Interview)*
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara adalah:
      "Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti".
   b) Kuisioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) kuisioner adalah:
      "Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Reseach)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (t*ext book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Metode Penarikan Sampel

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Sample pada penelitian ini adalah 36 pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Yaitu pegawai Bidang Akuntansi sebanyak 9 orang, Bidang Aset 10 orang, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 17 orang, semuanya berjumlah 36 orang.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42) Validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Validity is a *characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*".

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) Uji Realibitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

3.6 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

2. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.2.6.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode Partial Least Square (PLS) dijelaskan yaitu model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber data utama pada penelitian ini adalah berupa kuesioner yang disebar kepada 36 responden yang merupakan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

Sebelum menguji pengaruh antar variabel terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan *Pearson Correlation*. Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*).

Butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* nya lebih dari nilai rtabel dalam penelitian ini nilai rtabel adalah 0.329 (Signifikansi 5% & 36 responden).

Hasil uji validitas menunjukkan semua item memiliki nilai *pearson correlation* > 0.329 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel SAKD (X_1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) dan item Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Setelah pengujian validitas untuk masing masing butir pernyataan kuesioner dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah kuesioner telah mengukur dengan cermat dan tepat apa yang hendak diukur. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Split Half* dimana kuesioner dinyatakan *reliable* apabila hasil output perhitungan *Split Half* nya lebih dari nilai rtabel yaitu 0.329 (signifikansi 5%, responden 36).

4.1.2 Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang menjadi indikator untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada penelitian ini adalah Pencatatan, Penggolongan dan Pelaporan yang diaplikasikan ke dalam 5 pernyataan. Rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 3 indikator variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Pencatatan	96	180	53%	Kurang
2		87	180	48%	Kurang
3		76	180	42%	Kurang
4	Penggolongan	159	180	88%	Sangat Baik
5	Pelaporan	147	180	82%	Baik
Total		**565**	**900**	**63%**	**Cukup**

4.1.3 Analisis Deskriptif Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang menjadi indikator pada penelitian ini untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pengawasan. Rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 5 indikator variabel Pengelolaan Keuangan Daerah yang di aplikasikan kedalam 6 pernyataan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
6	Perencanaan	145	180	81%	Baik
7	Pelaksanaan	158	180	88%	Sangat Baik
8	Penatausahaan	126	180	70%	Baik
9	Pertanggungjawaban	74	180	41%	Kurang
10		105	180	58%	Cukup
11	Pengawasan	135	180	75%	Baik
Total		**743**	**1080**	**69%**	**Baik**

4.1.4 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengukuran-pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari 4 indikator yang digunakan dalam variabel ini di implementasikan kedalam 9 pernyataan kuesioner dengan rata-rata skor penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
12	Relevan	112	180	62%	Cukup
13		80	180	44%	Kurang
14		85	180	47%	Kurang
15		110	180	61%	Cukup
16	Andal	146	180	81%	Baik
17		147	180	82%	Baik
18		146	180	81%	Baik
19	Dapat Dibandingkan	148	180	82%	Baik
20	Dapat Dipahami	118	180	66%	Cukup
Total		**1092**	**1620**	**67%**	**Cukup**

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

Tahapan pengujian pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka selanjutnya dilakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah *structural equation modeling* (SEM) dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.2.6. Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel *manifes* (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan

dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diduga akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk membuktikan kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ1= 0, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

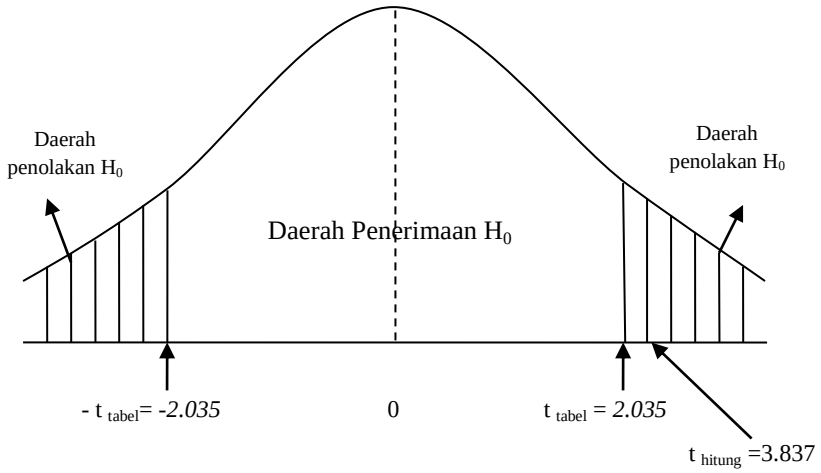
Ha: γ1≠ 0, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka t_{tabel} adalah *2.035* (df=36-2-1=33).

Uji *t* Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_1>Y	0.434	3.837	*2.035*	$H_{0\ Ditolak}$	Signifikan

Pada tabel 4.35 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.837> *2.035*(t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan Hipotesis X_1>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.837 berada didaerah penolakan Ho (t_{hitung}>t_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

4.1.7 Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengelolaan Keuangan Daerah diduga akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk membuktikan kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ2= 0, Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

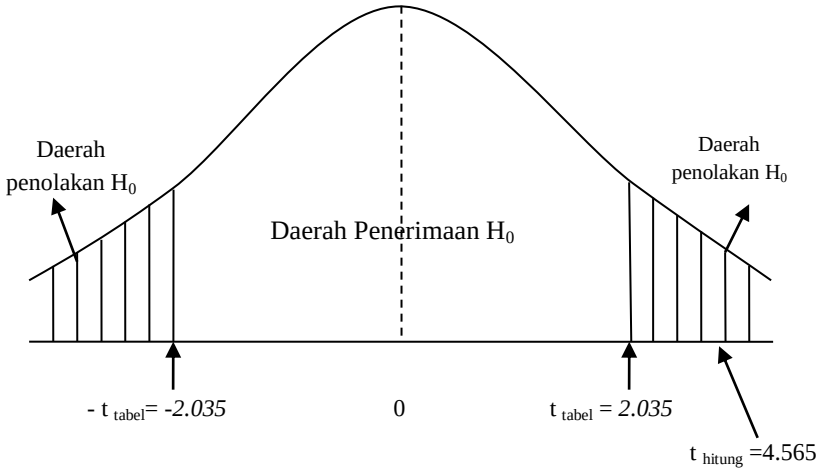
Ha: γ2≠ 0, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka t_{tabel} adalah *2.035* (df=36-2-1=33).

Uji *t* Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_2>Y	0.490	4.565	*2.035*	$H_{0\ Ditolak}$	Signifikan

Pada tabel 4.36 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 4.565 > *2.035*(t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan Hipotesis X_2>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 4.565 berada didaerah penolakan Ho (t_{hitung}>t_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 31.85%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Tinggi yaitu sebesar 0.734 (0.70-0.90). t_{hitung} diperoleh sebesar 3.837, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.035*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKD Kabupaten Bandung Barat. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang berarti semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik pula.

Dalam penelitian ini kedua variabel ini belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 37% untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan 33% untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil tanggapan responden, yang menjadi kekurangan utama dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah indikator Pencatatan.

4.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 37.05%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Tinggi yaitu sebesar 0.756 (0.70-0.90). t_{hitung} diperoleh sebesar 4.565, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.035*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baiknya Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat semakin baik pula.

Dalam penelitian ini Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 31%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam hal Pertanggungjawaban.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, artinya pengelolaan keuangan daerah yang baik maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Saran Operasional

a) Dalam meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah di kabupaten bandung barat yaitu agar lebih bisa baik lagi dalam pembuatan laporan keuangan lebih teliti lagi dalam memeriksa laporan keuangan karena kalau ada salah sedikit saja bisa mempengaruhi hasil yang lainnya. Instansi harus segera menyelasaikan masalah dalam pencatatan aset, baik dari sistemnya maupun dari pemeliharaan barangnya itu sendiri. Dan dilihat lagi tentang pencatatan aset tetap yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan harus melakukan pengecekan ke lapangan supaya terhindar dari kehilangan.

b) Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten bandung barat adalah agar bisa lebih baik lagi dalam mengelola anggaran daerah, instansi harus mempertanggungjawabkan kelebihan anggaran, selain itu juga harus adanya koordinasi komunikasi yang baik antara instansi dan kontraktor agar sesuai dalam mengelola keuangan atas pembangunan tersebut yang sudah di rencanakan.

2. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti good governance dan sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKD Kabupaten Bandung Barat bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel lebih banyak dari penulis agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di BPKD kabupaten bandung barat untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta : Salemba 4.

Abdul Halim, Muhammad Iqbal. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

As Syifa Nurillah, Dul Muid. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).* Volume 3 Nomor .2. ISSN: 2337-3806. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

Dadang Suwanda, Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. cetakan pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Erlina, Rambe Omar Sakti, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* Berdasarkan *PP NO 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013* Jakarta: Salemba Empat.

Ifa Ratifah, Mochammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* Trikonomika Volume 11, No.1, Juni 2012, Hal. 29–39 ISSN 1411-514X. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.

Imam Ghozali. 2006. *Metodologi Penelitian.* Edisi : Pertama. Bandung : Erlangga.

Iman Mulyana, 2010, *Manajemen dan kehidupan manusia* (https://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=kualitas+adalah&hl=id&ei=jSVGTujhNYXVrQeM9KTTAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=kualitas&f=false) Diakses Tanggal 12 Oktober 2016.

Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mohammad Nazir. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta : Salemba Empat.

Subadriyah, Anita Rahayuningsih. 2015. *Analisis Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ISSN: 2407-9189. Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Jepara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.